Volume 8 Issue 2 (2023) Pages 94 - 105
Jurnal Mirai Management
ISSN : 2598-8301 (Online)

Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka, Tingkat Pendidikan Dan Belanja Pemerintah Terhadap Kemiskinan Di Gerbangkertasusila Tahun 2015-2022

Zeratun Choir[1], Mega Tunjung Hapsari[2]
[1,2] *Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung*

Abstrak
Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh dari Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Tingkat Pendidikan, dan Belanja Pemerintah terhadap Kemiskinan di wilayah Gerbangkertasusila tahun 2015-2022. Penelitian ini termasuk penelitian kuantitatif asosiatif. Sumber data berupa data sekunder berasal dari BPS Jawa Timur. Teknik analisis data panel menggunakan metode Random Effect Model serta menggunakan alat analisis eviews-9. Hasil analisis memperlihatkan bahwa secara parsial Tingkat Pengangguran Terbuka dan Tingkat Pendidikan tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan. Belanja pemerintah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiksinan. Sementara itu, secara simultan TPT, Tingkat Pendidikan, dan Belanja Pemerintah berpengaruh siginifikan terhadap kemiskinan di Gerbangkertasusila.

Kata Kunci : *Tingkat Pengangguran Terbuka, Tingkat Pendidikan, Belanja Pemerintah, Kemiskinan*

Abstract
The pupose of this study is to examine the Open Unemployment Rate (TPT), Education Level, and Government Spending will affect poverty in the Gerbangkertasusila region from 2015 to 2022. This research is an assosiative quantitative research The data source is secondary data come from the Central Bureau of Statistics East Java. Panel data analysis techniques using the Random Effect Model method and using the eviews-9 analysis tool. The results of the partially the Open Unemployment Rate (TPT) and Education Level have no significant effect on poverty. Government spending had a negative and significant impact ion poverty. While simultaneously the Open Unemployment Rate (TPT), Education Level and Government Spending had a significant impact on poverty in Gerbamgkertasusila.

Keyword : *Open Unemployment Rate, Education Level, Government Spending, Poverty*

Copyright (c) 2023 Zeratun Choir

Corresponding author :
Email Address : zerachoir@gmail.com[1]

PENDAHULUAN

Kemiskinan sering diartikan semacam situasi dimana seseorang atau kelompok tidak mampu memenuhi kebutuhan pokoknya. Kemiskinan adalah suatu persoalan yang seringkali timbul dalam aktivitas bermasyarakat. Dampak dari masalah kemiskinan mampu mempengaruhi seluruh dimensi kehidupan manusia, meskipun yang terkena dampak seringkali tidak memahami keberadaannya (Giovani, 2018). Fenomena kemiskinan di negara berkembang seperti Indonesia dapat terjadi karena banyak faktor yang mempengaruhinya. Contohnya adalah seperti rendahnya tingkat pendidikan yang mengakibatkan jumlah

pengangguran semakin berlimpah, dan serta banyak pula masyarakat yang belum sanggup menggunakan layanan dan program dari pemerintah, akibatnya mereka sulit untuk memenuhi kebutuhan hidupnya (Rustanto, 2015). Banyak usaha yang telah dilaksanakan pemerintah guna menekan angka kemiskinan, salah satunya adalah dengan melakukan pemerataan pembangunan antar wilayah. Melalui Perda Provinsi Jawa Timur No. 04/1996 tentang RTRW Provinsi Jawa Timur dan PP No. 47/1996 tentang RTRW Nasional memutuskan kawasan kerjasama yang digolongkan menjadi 9 Satuan Wilayah Pembangunan. Gerbangkertasusila merupakan salah satu dari 9 SWP yang terdapat di Provinsi Jawa Timur yang meliputi 5 Kabupaten yaitu Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Sidoarjo, Lamongan, dan 2 Kota yaitu Kota Mojokerto, dan Surabaya, (Istifaiyah, 2015). Namun, berbagai usaha yang telah dijalankan Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebagai upaya menekan angka kemiskinan tidak semuanya bisa berhasil. Hal tersebut dapat kita lihat dari angka kemiskinan yang meningkat setiap tahun seperti yang terlihat dalam tabel dibawah.

Tabel 1. Jumlah Penduduk Miskin Gerbangkertasusila Tahun 2015-2022

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin Gerbangkertasusila Tahun 2015-2022 (persen)						
	Kab. Gresik	Kab. Bangkalan	Kab. Mojokerto	Kota Mojokerto	Kota Surabaya	Kab. Sidoarjo	Kab. Lamongan
2015	13.63	22.57	10.57	6.28	5.82	6.44	15.38
2016	13.19	21.41	10.61	5.73	5.63	6.39	14.89
2017	12.80	21.32	10.19	5.73	5.39	6.23	14.42
2018	11.89	19.59	10.08	5.50	4.88	5.69	10.20
2019	11.35	18.90	9.75	5.15	4.51	5.32	13.21
2020	12.40	20.56	10.57	6.24	5.02	5.59	13.85
2021	12.42	21.57	10.62	6.39	5.23	5.93	13.86
2022	11.06	19.44	9.71	5.93	4.72	5.36	12.53
Rata-rata	12.09	20.67	10.26	5.86	5.15	5.86	13.54

Sumber : (*Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur*, n.d.)

Dari tabel 1 diketahui bahwa jumlah penduduk miskin di wilayah Gerbangkertasusila masih belum stabil dan mengalami naik turun setiap tahunnya. Kabupaten Bangkalan menduduki posisi pertama persentase kemiskinan tertinggi dengan rata-rata 20.67%. Sedangkan persentase terendah dipduduki oleh Kota Surabaya dengan rata-rata persentase sebesar 5.15%. Kegagalan pemerintah dalam upaya mengatasi masalah kemiskinan menjadi penyebab angka kemiskinan di Jawa Timur masih tinggi.

Tabel 2. Tingkat Pengangguran Terbuka Gerbangkertasusila Tahun 2015-2022

Tahun	Tingkat Pengangguran Terbuka Gerbangkertasusila Tahun 2015-2022 (persen)

	Kab. Gresik	Kab. Bangkalan	Kab. Mojokerto	Kota Mojokerto	Kota Surabaya	Kab. Sidoarjo	Kab. Lamongan
2015	5.67	5.00	4.05	4.88	7.01	6.30	4.10
2016	4.81	5.28	4.29	3.33	7.29	5.56	3.88
2017	4.54	4.48	5.00	3.61	5.98	4.97	4.12
2018	5.71	5.09	4.27	2.44	6.01	4.62	3.10
2019	5.40	5.62	3.61	2.63	5.76	4.62	3.89
2020	8.21	8.77	5.75	6.74	9.79	10.97	5.13
2021	8.00	8.07	5.54	6.87	9.68	10.87	4.90
2022	7.84	8.05	4.83	5.05	7.62	8.80	6.05
Rata-rata	6.27	6.29	4.66	4.44	7.39	7.08	4.39

Sumber : (*Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur*, n.d.)

Dalam tabel 2 berkaitan dengan tingkat pengangguran terbuka di wilayah Gerbangkertasusila dapat diketahui bahwa persentase tingkat pengangguran terendah berada pada Kabupaten Lamongan dengan rata-rata presentase 3.39 persen. Sedangkan persentase tertinggi ada pada Kota Surabaya yaitu sebesar 7.39 persen. Selain tingkat pengangguran, kemiskinan juga dapat dipengaruhi oleh pendidikan. Pendidikan merupakan kebutuhan dasar manusia, karena dengan hal tersebut memungkinkan adanya peningkatan kualitas hidup. Pendidikan yang tinggi diperlukan agar seseorang bisa mendapatkan pekerjaan dan memenuhi kebutuhan hidupnya. Menurut Teori Modal Manusia, pendidikan berdampak pada pertumbuhan ekonomi karena pendidikan berperan sangat penting untuk meningkatkan produktifitas tenaga kerja (Rusdiana, 2021).

Tabel 3. Rata-rata Lama Sekolah umur ≥ 15 tahun Gerbangkertasusila Tahun 2015-2022

Tahun	Rata-rata Lama Sekolah Gerbangkertasusila Tahun 2015-2022 (persen)						
	Kab. Gresik	Kab. Bangkalan	Kab. Mojokerto	Kota Mojokerto	Kota Surabaya	Kab. Sidoarjo	Kab. Lamongan
2015	9.31	5.79	8.19	10.10	10.54	10.46	7.61
2016	9.14	5.99	8.31	9.21	10.60	10.41	7.79
2017	9.25	5.89	8.80	10.16	9.86	9.98	8.10
2018	9.39	6.28	8.68	1017	9.74	10.20	8.34
2019	9.61	6.46	8.91	10.72	10.22	9.84	8.48
2020	9.61	6.92	8.91	10.00	10.48	10.65	8.43
2021	9.86	6.66	9.06	11.10	10.52	10.83	8.50
2022	9.75	5.97	8.97	10.80	10.51	10.77	8.33

Rata-rata	9.47	6.24	8.72	10.25	10.30	10.36	8.19

Sumber : BPS Jawa Timur (diolah)

Dari tabel 3 dijelaskan total rata-rata lama sekolah umur ≥ 15 tahun di Gerbangkertasusila. Pada Gerbangketasusila rata-rata sekolah paling tinggi dipduduki oleh Kabupoten Sidoarjo yaitu sebesar 10.36 persen. Sedangkan posisi terendah dipduduki oleh Kabupaten Bangkalan dengan rata-rata persentase 6.24 persen. Faktor terakhir yang mungkin juga dapat mempengaruhi kemiskinan adalah belanja pemerintah. Fungsi belanja pemerintah dalam ekonomi dapat dijelaskan dengan konsep fungsi pendapatan nasional yang diperkenalkan oleh Keyness. Pengeluaran pemerintah adalah satu dari beberapa elemen yang membentuk PDB dan PDRB negara. (Sutiono, 2018)

Tabel 4. Belanja Pemerintah Gerbangkertasusila Tahun 2015-2022

Tahun	Belanja Pemerintah Gerbangkertasusila Tahun 2015-2022 (ribu rupiah)						
	Kab. Gresik	Kab. Bangkalan	Kab. Mojokerto	Kota Mojokerto	Kota Surabaya	Kab. Sidoarjo	Kab. Lamongan
2015	2525908333	1838553588	2151268147	706623478	64406568007	3532547651	2367704837
2016	2639536678	2029982516	2552272524	979297437	82423575113	4250854453	2933116114
2017	2810134969	2262540625	2626006572	783845885	90833274221	4638116733	2812161732
2018	3041863242	2295245904	2733959681	961881617	93645147119	5223073071	2885707007
2019	3128640309	2384438163	2587155645	978603407	95150975110	4839388930	2976836953
2020	3401481717	2249539141	2754348923	1073715285	83490766211	5542730859	2881437372
2021	3433486214	2312078859	2595776292	1047609618	98383927947	5333818677	2901619967
2022	3682750862	2327635802	2989685090	1096780652	10395185797	4872129193	3118179802
Rata-rata	3082975291	2212501825	2623809109	953544672.4	92554217678	4779082446	2859595473

Sumber : Badan Pengeloaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur

Tercatat bahwa belanja pemerintah di Gerbangkertasusila selama periode Tahun 2015-2022 mengalami naik turun. Belanja pemerintah tertinggi ddiduduki oleh Kota Surabaya dengani rata-rata sebesar Rp.9.2 miliar, sedangkan posisi terendah dipduduki oleh Kota Mojokerto rata-rata sebesar Rp. 9.5 ratus juta. Penelitian yang dilakukan oleh Anjela, Tri dan Mauna (Wongkar, Anjela Nadia. Rotinsulu, Tri Oldy. Maramis, 2023) menjelaskan bahwa belanja pemerintah memiliki dampak yang negatif terhadap tingkat kemiskinan. Pada

penelitian tersebut dinyatakan bahwa apabila pengeluaran pemerintah mengalami peningkatan sebesar 1 milyar rupiah, maka tingkat kemiskinan akan turun sebesar 1.106702 ribu jiwa. Hal tersebut selaras dengan temuan Goni, Kalangi, dan Tolosal (Goni et al., 2022) yang menyatakan jika belanja pemerintah yang dikeluarkan semakin meningkat dalam waktu yang lama, pada akhirnya akan dapat menjadi aspek atau faktor yang dapat menurunkan angka kemiskinan.

Alasan penulis memilih lokasi penelitian di wilayah Gerbangkertasusila adalah karena di wilayah Jawa Timur termasuk yaitu Gerbangkertasusila tingkat kemiskinannya masih belum stabil, tidak sepenuhnya mengalami penurunan. Kawasan Gerbangkertasusila yang berada di perkotaan yang diharapkan dapat menjadi pusat pertumbuhan ekonomi nyatanya masih terjadi ketimpangan ekonomi. Selain itu masih belum maksimalnya tingkat pendidikan formal yang ditamatkan, menyebabkan kurangnya SDM yang bermutu dan berkompeten. Maka dari itu, harus ada usaha dari pemerintah dalam menuntaskan masalah kemiskinan dengan cara menambah lapangan pekerjaan sebanyak-banyaknya agar tingkat pengangguran bisa berkurang, dan mendorong masyarakat untuk mengenal pendidikan bahwa pendidikan sangatlah penting. Dengan begitu, akan banyak SDM yang berkualitas dan mendapat pekerjaan yang layak, sehingga tingkat kemiskinan akan semakin menurun. Berlandaskan paparan diatas, penulis tertarik melakukan penelitian mengenai Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka, Tingkat Pendidikan, dan Belanja Pemerintah terhadap Kemiskinan di Wilayah Gerbangkertasusila Tahun 2015-2022.

Kemiskinan

Kemiskinan secara harfiah berawal dari kata "miskin" yang bermakna "tidak berharta-benda". Dengan kata lain, kemiskinan diartikan sebagai keadaan seseorang, kelompok atau pun keluarga tidak mampu, sehingga keadaan tersebut rentan terhadap munculnya masalah-masalah sosial lainnya. Menurut Narayan miskin dimaknai sebagai kondisi kekurangan aset atau kekayaan dan kemampuan termasuk harta kekayaan, kredibilitas, kesehatan, emosi, penghargaan, label budaya, imajinasi, fakta, pendidikan, kecakapan dan tanggungjawab dalam berorganisasi di ranah politik (Rustanto, 2015)**.** Teori Adam Smith yang berkaitan dengan kemiskinan mengatakan bahwa tidak ada masyarakat yang akan bahagia dan sejahtera, jika sebagian besar masyarakatnya hidup miskin dan sengsara. Menurut pendapat Adam Smith dalam buku *The Wealth Of Nations* mengatakan bahwa bukan hanya hal-hal alami yang dapat mengatur kebutuhan dasar, akan tetapi juga hal-hal yang ditentukan oleh standar martabat bersama (Todaro & Smith, 2011).

Tingkat Pengangguran Terbuka

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan pengangguran sebagai kondisi manusia yang tidak mempunyai pekerjaan (Depdiknas, 1990). Sedangkan definisi pengangguran terbuka adalah anggota pupulasi usia kerja yang belum dipekerjakan untuk jangka waktu tertentu tatapi bersedia mendapatkan pekerjaan dan aktif mencari pekerjaan (Rivai, 2019). Persentase angkatan kerja yang belum memperoleh pekerjaan itulah yang dikenal sebagai tingkat pengangguran (Raharja & Manurug, 2008).Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dapat dihitung dengan rumus : (Rivai, 2019)

$$\text{Tingkat Pengangguran} = \frac{Jumlah\ Pengangguran}{Jumlah\ Angkatan\ Kerja} x100\%$$

Teori Malthus menyatakan bahwa semakin pesat pertumbuhan penduduk, maka tenaga kerja pun juga akan semakin meningkat, tetapi kesempatan kerja tidak mampu mengimbanginya sehingga menyebabkan pengangguran (Desmawan, 2021).

Tingkat Pendidikan

Menurut Pasal 1 UU 20/2003 Tentang Sisdiknas mengemukakan bahwa pendidikan adalah suatu usaha yang dilakukan dengan sadar dan sistematik guna menciptakan proses belajar yang memungkinkan peserta didik dapat mengembangkan kemampuannya dengan aktif, baik dari segi jasmani (fisik) maupun rohani yang dibutuhkan oleh diri sendiri, orang lain,bangsa dan negara (Riani, 2021). Tujuan pendidikan ialah mewujudkan serta meningkatkan kemampuan diri manusia secara utuh, simultan, dan berkelanjutan untuk memnuhi tugas dan tanggungjawabnya dalam kehidupan agar mendapat kebahagiaan di masa sekarang dan di masa depan (Ahmadi, 2014)**.** Salah satu teori yang berhubungan dengan pendidikan Teori modal manusia. Menurut para pendukung teori ini, mereka yang berpendidikan tinggi, yang juga diukur dengan berapa lama mereka sekolah, akan mempunyai pekerjaan dan gaji yang lebih tinggi pula. Jika upah mencerminkan produktivitas, orang yang berpendidikan tinggi juga akan semakin banyak, sehingga tingkat produktivitas akan semakin meningkat, dampaknya perekonomian nasional akan berkembang semakin pesat (Nugroho, 2014).

Belanja Pemerintah

Belanja pemerintah merujuk pada alokasi anggaran yang dibuat dalam APBN setiap tahunnya. Alokasi anggaran tersebut digunakan untuk berbagai sektor dan bidang melalui berbagai program dan kebijakan dengan tujuan memajukan kesejahteraan masyarakat. Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, belanja pemerintah Indonesia dibagi menjadi dua kelompok dalam yaitu belanja rutin dan belanja pembangunan (Sadat, 2022)**.** Salah satu teori yang berhubungan dengan belanja pemerintah adalah Teori Adolf Wagner. Wagner berpendapat bahwasanya belanja pemerintah dan aktivitas pemerintah cenderung meningkat seiring berjalannya waktu. Inti dari teori ini adalah fungsi pemerintah dalam aktivitas dan kehidupan ekonomi masyarakat secara keseluruhan akan semakin meningkat. Menurut Wagner, ketika pendapatan per orang meningkat, belanja pemerintah juga akan meningkat dikarenakan pemerintah diharuskan mengontrol interaksi sosial yang melibatkan masyarakat, budaya, hukum, pendidikan, rekreasi, dan lain sebagainya. Menurut aturan Wagner, beberapa alasan belanja pemerintah mengalami peningkatan adalah berkaitan dengan meningkatnya fungsi keamanan, pertahanan dan ketertiban, peningkatan fungsi perbankan, fungsi ketenteraman serta peningkatan fungsi pembangunan (Sadat, 2022).

METODOLOGI

Dalam penelitian ini menggunakan dengan metode kuantitatif asosiatif yang bertujuan untuk meneliti hubungan antar dua variabel atau lebih (Sadat, 2022). Variabel yang digunakan yaitu variabel independen yang meliputi tingkat pengangguran terbuka, tingkat pendidikan, dan belanja pemerintah. Sedangkan variabel terikatnya adalah kemiskinan. Sampel dalam penelitian menggunakan sampel data laporan kemiskinan, data tingkat pengangguran terbuka, tingkat pendidikan dan pengeluaran pemerintah Gerbangkertasusila dari tahun 2015-2022. Sumber data berupa data sekunder yang berasal dari BPS Jawa Timur. Metode analisis regresi data panel menggunakan *Random Effect Model* dengan alat analisis *E-views 9.* Sehingga model fungsi yang digunakan adalah :

$$TK = \alpha_0 + \beta_1 TPT_{it} + \beta_2 TP_{it} + \beta_3 BP_{it} + \mu_{it}$$

Dimana :

TK	: Tingkat Kemiskinan
TPT	: Tingkat Pengangguran Terbuka
TP	: Tingkat Pendidikan
BP	: Belanja Pemerintah
α_0	: Intersep
$\beta_1, \beta_2, \beta_3$	: Koefisien variabel
μ_{it}	: *Error Term*

I : 1, 2, 3,… 7 (data *cross section* 7 Kabupaten/Kota)
t : 1, 2, 3,… 8 (data *time series* tahun 2015-2022)

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Uji Pemilihan Model

Uji ini digunakan untuk mengidentifikasi model terbaik diantara tiga model regresi, yakni Common Effect Model, Fixed Effect Model, dan Random Effect Model. Dalam uji ini hipotesisnya ialah : H_0 = Model Commont Effect, H_a = Model Fixed Effect.

a. Uji Chow

Uji ini untuk menentukan satu model terbaik antara Common Effect Model (CEM) dan Fixed Effect Model (FEM). Dalam uji ini hipotesisnya adalah: H_0 = Model Commont Effect, H_a = Model Fixed Effect.

Tabel 5. Hasil Uji Chow

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	249.390780	(6,46)	0.0000
Cross-section Chi-square	196.695389	6	0.0000

Sumber : Data Diolah (Eviews 9)

Tabel 5 memperlihatkan bahwa berdasarkan uji chow diperoleh nilai Probabilitas pada Cross-Section F < 0.05 (0.0000 < 0.05) sehingga H_0 ditolak dan H_a diterima. Maka dalam uji ini model terbaik ialah Fixed Effect.

b. Uji Hausman

Uji ini untuk mengidentifikasi satu model terbaik antara Fixed Effect dan Random Effect. Dalam uji ini hipotesisnya ialah: H_0 = Model Random Effect, H_a = Model Fixed Effect.

Tabel 6. Hasil Uji Hausman

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	3.966643	3	0.2651

Sumber : Data diolah (2023)

Tabel 6 menunjukkan bahwa nilai Probabilitas > 0.05 (0.2651 > 0.05), maka H_0 diterima dan H_a ditolak. Dalam uji ini model yang lebih baik ialah Random effect.

2. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Gambar 1. Hasil Uji Normalitas

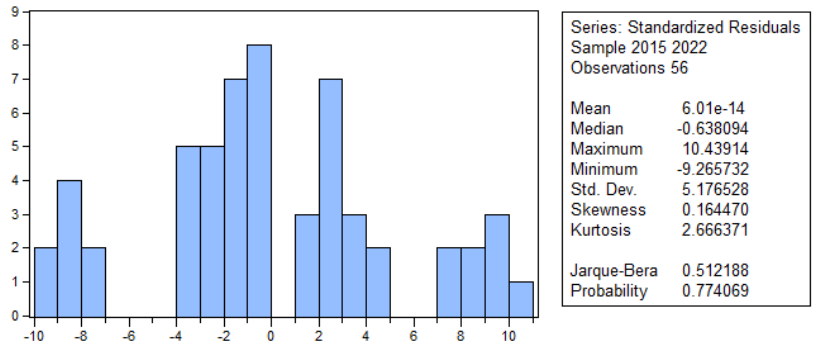

Sumber : Data Diolah (2023)

Gambar 1 menunjukkan hasil uji normalitas dengan nilai probabilitas 0.774069 > 0.05, sehingga data dikatakan berdistribusi normal.

b. Uji Multikolinearitas

Tabel 7. Hasil Uji Multikolinearitas

	X1	X2	LOG_X3
X1	1.000000	-0.228251	0.500159
X2	-0.228251	1.000000	-0.231646
LOG_X3	0.500159	-0.231646	1.000000

Sumber : Data Diolah (2023)

Hasil dari uji multikolinearitas diatas dapat dijelaskan bahwa nilai korelasi antara X1 sebesar 1.000.000, X2 sebesar -0.228251 dan X3 sebesar 0.500159 < 0.90 maka dalam regresi tidak terdapat gejala multikolinearitas.

c. Uji Heteroskedastisitas

Tabel 8. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	2.025941	12.51082	0.161935	0.8720
X1	-0.052363	0.060776	-0.861566	0.3929
X2	-0.000158	0.000717	-0.220430	0.8264
LOG_X3	0.010065	0.578460	0.017400	0.9862

Sumber : Data Diolah (2023)

Tabel 8 menunjukkan bahwa nilai probabilitas X1, X2 dan X3 > 0.05, sehingga dapat disimpulkan bahwa setiap variable independen tidak mengalami gejala heterokedastiditas.

3. Uji Hipotesis

a. Uji t (parsial)

Tabel 9. Hasil Uji t

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	86.61253	19.98603	4.333653	0.0001
X1	0.093093	0.076145	1.222580	0.2270
X2	-0.000199	0.000885	-0.224649	0.8231
LOG_X3	-3.513273	0.921526	-3.812453	0.0004

Sumber : Data diolah (2023)

Dari tabel 9 menunjukkan bahwa hasil pengujian memiliki nilai sebesar 1.222580 untuk t_{hitung} dan 0.2270 untuk nilai probabilitas. Secara statistik membuktikan bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan, karena nilai t_{hitung} < nilai t_{tabel}(1.222580 < 1.67469) dan nilai probabilitas TPT 0.2270 > 0.05. Hasil pengujian variabel tingkat pendidikan memiliki nilai t_{hitung} -0.224649 dan nilai probabilitas 0.8231. sehingga tingkat pendidikan tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Gerbangkertasusila karena nilai t_{hitung} lebih rendah dari nilai t_{tabel} (-0.224649 < 1.6749) dan nilai probabilitas TP 0.8231 > 0.05. Hasil output regresi untuk nilai t_{hitung} dan nilai probabilitas pada tabel diatas adalah -0.3812453 dan nilai probabilitas 0.0004. Maka, belanja pemerintah berpengaruh dan tidak signifikan terhadap kemiskinan di Gerbangkertasusila karena nilai t_{hitung} lebih redah dari nilai t_{tabel} (-0.3812453 < 1.6749) dan nilai probabilitas BP 0.0004 < 0,05.

b. **Uji F (Simultan)**

Tabel 10. Hasil Uji F

F-statistic	4.304616
Prob(F-statistic	0.008714

Sumber : Data Diolah (2023)

Dari tabel 10 memperlihatkan nilai probabilitas F-Statistik 0.008714 < 0.05. Berdasarkan hal tersebut dapat dikatakan bahwa secara simultan, Tingkat Pengangguran Terbuka, Tingkat Pendidikan, dan Belanja Pemerintah berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan.

c. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel 11. Hasil Koefisien Determinasi

R-squared	0.198938
Adjusted R-squared	0.152723

Sumber : Data Diolah (2023)

Dari tabel 11 memperlihatkan nilai koefisien determinasi R-square sebesar 0.198939 x 100% = 19,89%. Hal ini dapat dijelaskan bahwa variable tingkat pengangguran terbuka, tingkat pendidikan, dan belanja pemerintah sebesar 19,89% dapat menjelaskan variasi

dari tingkat kemiskinan di wilayah Gerbangkertasusila. Sedangkan sebesar 80,11% dijelaskan oleh variabel lain diluar variabel dalam penelitian ini.

1. Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka Terhadap Tingkat Kemiskinan

Menurut Teori Malthus yang menyatakan bahwa jika pertumbuhan penduduk pesat maka tenaga kerja akan meningkat pesat pula, namun kesempatan kerja yang tidak seimbang dapat mengakibatkan masyarakat harus bersaing untuk mendapatkan pekerjaan tersebut, dan masyarakat yang tidak dapat mampu bersaing dalam mendapatkan pekerjaan tersebut akan masuk kedalam kelompok pengangguran. Berdasarkan hasil analisis regresi dalam uji t, tingkat pengangguran terbuka tidak berpengaruh akan tetapi berhubungan positif terhadap tingkat kemiskinan di Gerbangkertasusila. Temuan penelitian ini memperlihatkan nilai koefisien 0.093093 yang berarti bahwa setiap tingkat pengangguran terbuka mengalami kenaikan 1%, menyebabkan kemiskinan naik sebesar 0.093093 persen. Temuan ini sejalan dengan temuan Mukhtar, Saptono & Arifin (Mukhtar et al., 2019) yang menyatakan bahwa tidak semua pengangguran itu adalah korban dari kalahnya persaingan dalam memperoleh pekerjaan, akan tetapi merupakan sebuah pilihan dari setiap individu untuk memilih tidak bekerja dengan alasan tertentu. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak semua orang yang menganggur itu dapat menjadi faktor meningkatnya kemiskinan di Indonesia. Hal ini juga selaras dengan penenlitian mengenai pengaruh IPM, TPT dan Belanja Pemerintah terhadap Kemiskinan di Kabupaten Bolaang Mongondow (Wongkar, Anjela Nadia. Rotinsulu, Tri Oldy. Maramis, 2023).

2. Pengaruh Tingkat Pendidikan Terhadap Tingkat Kemiskinan

Dalam teori modal manusia, pendidikan sangat berperan penting dalam menciptakan SDM yang terdidik dan unggul. Dalam teori ini, inti daripada pendidikan itu adalah bagaimana pendidikan dapat dijadikan sebagai sarana yang dapat meningkatkan kehidupan masyarakat menuju kehidupan lebih baik dan memperoleh kesejahteraan. Berdasarkan temuan analisis regresi ada uji t, kemiskinan di Gerbangertasusila tidak dipengaruhi secara signifikan oleh variabel tingkat pendidikan. Hasil temuan penelitian ini memperlihatkan setiap peningkatan tingkat pendidikan 1%, menyebabkan tingkat kemiskinan turun sebesar -0.000199 persen. Sesuai teori yang digunakan, pendidikan yang tinggi akan dapat menurunkan tingkat kemiskinan. Hal ini selaras dengan studi yang dilakukan oleh Suripto dan Subayil dimana tingkat pendidikan tidak mempengaruhi kemiskinan (Suripto & Subayil, 2020).

3. Pengaruh Belanja Pemerintah Terhadap Tingkat Kemiskinan

Menurut Teori Adolf Wagner menyatakan bahwa semakin meningkatnya peran pemerintah dalam kegiatan perekonomian yang diikuti dengan peningkatan pendapatan perkapita, otomatis belanja pemerintah pun juga akan meningkat. Hal tersebut disebabkan pemerintah perlu mengelola hubungan antar masyarakat. fasilitas pendidikan, fasilitas umum, hukum dan lain sebagainya. Adanya pengeluaran pemerintah yang mendorong pembangunan ekonomi dapat mempercepat tingkat pertumbuhan ekonomi sehingga tingkat kemiskinan akan mengalami penurunan. Berdasarkan hasil analisis regresi dalam uji t, variabel belanja pemerintah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Gerbangkertasusila. Hasil penelitian ini menunjukkan nilai koefisien -3.513273 yang berarti jika belanja pemerintah meningkat 1 miliyar rupiah, maka tingkat kemiskinan akan mengalami penurunan sebesar -3.513273 persen. Penelitian ini selaras dengan penelitian Miar & Yunani (Yunani & Miar, 2020) mengenai *The Analysis of The Government Expenditure on Poverty In Indonesia* yang menyatakan bahwa apabila belanja pemerintah tersebut digunakan sebagai jalur pembangunan seperti pembangunan fasilitas kesehatan, fasilitas sosial, barang publik,

fasilitas pendidikan maka belanja pemerintah dan kemiskinan akan memiliki hubungan yang negatif. Hubungan negatif tersebut maksudnya adalah semakin tinggi pengeluran pemerintah, maka semakin rendah tingkat kemiskinan di Indonesia. Penelitian ini selaras dengan penelitian La Ode (Hadi, 2019) yang menerangkan bahwa apabila pengeluaran pemerintah meningkat sejumlah 1 milyar rupiah, maka tingkat kemiskinan akan turun sebesar 0.000448%. Dapat disimpulkan dari hasil regresi dalam uji-F bahwa tingkat pengangguran terbuka, tingkat pendidikan, dan belanja pemerintah secara kolektif berpengaruh terhadap variabel tingkat kemiskinan di Gerbangkertasusila, dengan nilai F-Statistik 4.304616 dan nilai probabilitas dari F-Statistik sebesar 0.008714 < 0.05.

SIMPULAN

Kesimpulan yang didapat dalam temuan studi bahwa tingkat kemiskinan di Gerbangkertasusila tidak dipengaruhi oleh variabel tingkat pengangguran terbuka. Hal ini karena tidak semua orang yang menganggur termasuk kategori orang miskin. Tingkat pendidikan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat kemiskinan, hal ini karena tingkat pendidikan di Gerbangkertasusila masih cukup tinggi sehingga meningkatkan produktivitas masyarakat yang dapat mengurangi angka kemiskinan. Variabel belanja pemerintah berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan di Gerbangkertasusila. Secara simultan ketiga variabel tersebut berpengaruh terhadap kemiskinan di Gerbangkertasusila periode tahun 2015-2022. Pemerintah sebagai pemangku kebijakan diharapkan dapat mengambil dan menerapkan kebijakan terkait faktor apa saja yang mempengaruhi kemiskinan. Meskipun tingkat pengangguran tidak berdampak signifikan terhadap kemiskinan, akan tetapi hal tersebut adalah masalah sosial yang perlu diawasi dan dicermati. Kualitas pendidikan yang baik akan mampu mengurangi tingkat kemiskinan dan mewujudkan kesejahteraan. Hasil temuan penelitian ini diharapkan dapat menjadi alasan yang menarik bagi penelitian selanjutnya untuk mencoba mengkaji lebih dalam dan lebih luas lagi dengan menambah variasi dari variabel yang digunakan, seperti, inflasi, PDRB, IPM dan lain sebagainya.

Referensi :

Ahmadi, R. (2014). *Pengantar Pendidikan : Asas & Filsafat Pendidikan*. Ar-Ruzz Media.

Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur. (n.d.). https://jatim.bps.go.id/

Depdiknas. (1990). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pusat.

Desmawan, D. (2021). *Faktor Doniman Revalitas Kemiskinan: Pendekatan Analisis Data Panel*. Media Sains Indonesia.

Giovani, R. (2018). Analisis Pengaruh PDRB, Pengangguran dan Pendidikan Terhadap Tingkat Kemiskinan di Pulau Jawa Tahun 2009-2016. *Economics Development Analysis Journal*, *7*(1), 23–31. https://doi.org/10.15294/edaj.v7i1.21922

Goni, N., Kalangi, J. B., & Tolosang, K. D. (2022). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Minahasa Tenggara. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, *22*(5), 121–132. https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jbie/article/view/42779/37706

Hadi, P. L. ode M. A. F. (2019). Pengaruh PDRB, Tingkat Pendidikan, Tingkat Kesehatan, Dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Tingkat Kemiskinan DI Propinsi Jawa Timur. *Jurnal Ekonomi Universitas Islam Indonesia*, *53*(9), 1689–1699.

Istifaiyah, L. (2015). Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum dan Pengangguran Terbuka terhadap Tingkat Kemiskinan (Studi Kasus Gerbangkertasusila Tahun 2009-2013). *Jurnal Ilmiah*, 5.

Mukhtar, S., Saptono, A., & Arifin, A. S. (2019). Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia Dan Tingkat Pengangguran Terbuka Terhadap Kemiskinan Di Indonesia.

Ecoplan : Journal of Economics and Development Studies, *2*(2), 77–89. https://doi.org/10.20527/ecoplan.v2i2.20

Nugroho. (2014). PENGARUH PENDIDIKAN TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI Nugroho SBM Fakultas Ekonomika dan Bisnis Undip. *Media Ekonomi Dan Manajemen*, *29*(2), 195–202.

Raharja, P., & Manurug, M. (2008). *Pengantar Ilmu Ekonomi*. Fakultas Ekonomi Indonesia.

Riani. (2021). *Pentingkah Pendidikan?* Pustaka Taman Ilmu.

Rivai, S. (2019). *Mari Belajar Ekonomi: Buku Peminatan Ilmu Sosial Kelas XI*. Uwais Literasi Indonesia.

Rusdiana. (2021). *Kebijakan Pendidikan*. Pusat Penelitian Dan Penerbitan Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Rustanto, B. (2015). *Menangani Kemiskinan*. PT Remaja Rosdakarya.

Sadat. (2022). *Tata Kelola Keuangan Pemerintahan*. Deepublish.

Suripto, & Subayil, L. (2020). Pengaruh Tingkat Pendidkan, Pengangguran, Pertumbuhan Ekonomi Dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Kemiskinan Di D.I.Yogyakarta Priode 2010-2017. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Pembangunan*, *1*(2), 127.

Sutiono, F. (2018). PENGARUH BELANJA PEMERINTAH TERHADAP KETIMPANGAN PENDAPATAN DI JAWA TIMUR (Studi Kasus Kabupaten/Kota Di Jawa Timur Tahun 2010-2015). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya*, *6*(2).

Todaro, M. P., & Smith, S. c. (2011). *Pembangunan Ekonomi* (kesebelas). Erlangga.

Wongkar, Anjela Nadia. Rotinsulu, Tri Oldy. Maramis, M. T. B. (2023). Pengaruh IPM, Tingkat Pengangguran Terbuka Dan Belanja Pemerintah Terhadap Kemiskinan Di Kabupaten Bolaang Mongondow. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, *23*(3), 49–60.

Yunani, A., & Miar. (2020). The Analysis of Influence of The Government Expenditure on Poverty in Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, *18*(01), 91–102.